

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong peningkatan penggunaan transaksi elektronik dalam berbagai bidang hukum, termasuk dalam praktik kenotariatan. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum terkait keautentikan akta partij yang dibuat oleh notaris dalam konteks transaksi elektronik, terutama apabila keautentikannya dipermasalahkan di kemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai keautentikan akta partij dalam transaksi elektronik, bentuk dan batas pertanggungjawaban notaris, serta implikasi hukumnya terhadap kepastian hukum di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang ada belum sepenuhnya terharmonisasi antara hukum kenotariatan dan hukum transaksi elektronik, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terkait keautentikan akta partij. Selain itu, batas pertanggungjawaban notaris dalam transaksi elektronik masih belum diatur secara tegas dan berpotensi menimbulkan perluasan tanggung jawab yang tidak proporsional. Implikasi hukum dari permasalahan tersebut berdampak pada melemahnya kepastian hukum, baik bagi para pihak maupun bagi notaris sebagai pejabat umum. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dan harmonisasi regulasi serta penegasan batas pertanggungjawaban notaris agar akta partij tetap berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

Kata Kunci: Notaris, Akta Partij, Transaksi Elektronik, Keautentikan Akta

ABSTRACT

The rapid development of information technology has encouraged the increasing use of electronic transactions in various legal fields, including notarial practice. This condition raises legal issues concerning the authenticity of party deeds drawn up by notaries in the context of electronic transactions, particularly when their authenticity is challenged at a later stage. This study aims to analyze the legal regulation of the authenticity of party deeds in electronic transactions, the forms and limits of notarial liability, and the legal implications for legal certainty in the digital era. The research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case law approaches. The findings indicate that the existing legal framework has not yet been fully harmonized between notarial law and electronic transaction law, resulting in legal uncertainty regarding the authenticity of party deeds. Furthermore, the limits of notarial liability in electronic transactions remain unclear and potentially lead to a disproportionate expansion of liability. These legal issues have significant implications for weakening legal certainty, both for the parties involved and for notaries as public officials. Therefore, regulatory reform and harmonization, as well as the clarification of the limits of notarial liability, are necessary to ensure that party deeds continue to function as instruments of legal certainty that are adaptive to technological developments.

Keywords: Notary, Party Deed, Electronic Transactions, Authenticity of Deeds